KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pe mbangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.



Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Pendapatan Daerah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah.

Tanjung Selor, Agustus 2025

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dr. Tomy Labo,SE.,M.Si
Pembina Madya Utama
NIP. 19700110 199803 1009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**
Daftar Isi **iii**
Daftar Tabel **iv**
Daftar Gambar **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **7**
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah BAPENDA 12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA 25
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 26
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.2.2 Isu Strategis 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **36**
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah 36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **42**
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD 42
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 101

BAB V PENUTUP **103**
5.1 Kesimpulan 103
5.2 Kaidah Pelaksanaan 103
5.3 Pengendalian dan Evaluasi 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana (PNS)	13
Tabel 2.2	Data Pegawai Non PNS	13
Tabel 2.3	Data PEgawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.4	Data Peawai Berdasarkan Kelompok Usia	15
Tabel 2.5	Jumlah Saran dan Perasarana Perangkat Daerah	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BADAN PENDAPATAN DAERAH	21
Tabel 2.7	Realisasi Penerimaan BAPENDA 2020 sd 2024	22
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BAPENDA	24
Tabel 2.9	Kelompok Sasaran layanan	25
Tabel 2.10	Mitra Perangkat Daerah	26
Tabel 2.11	Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab PD	29
Tabel 2.12	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BAPENDA	30
Tabel 2.13	Perumusan Isu Perangkat Daerah	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA	37
Tabel 3.2	Penetuan Strategi BAPENDA	39
Tabel 3.3	Arah Kebijakan BAPENDA	40
Tabel 3.4	Pertahapan Renstra Perangkat Daerah	41
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara	43
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah BAPENDA dan UPTD. BAPENDA Prov Kaltara	69
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Dalam mendukung Program Prioritas PD	100
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	101
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPENDA	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD. BAPENDA	12
Gambar 3.1	Pohon Kinerja BAPENDA	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029, yaitu Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum dan Ingkong Ala, SE., M.Si., pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi permulaan periode pembangunan daerah yang baru yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Badan Pendapatan Daerah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tata cara dan tahapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (16-361 /2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 53);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara: (1/39/2017));
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12 Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor (13-190/2024));
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor ……. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selama periode lima tahun, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran kinerja, permasalahan dan isu strategis.
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai dengan indikator, target dan pagu indikatif.
4. Menetapkan indicator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK)
5. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelayanan perangkat daerah.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
1.3 Maksud dan Tujuan; dan
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dalam Pemberian Pelayanan; dan
- 2.1.6 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut :

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan;
5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak tertentu daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengedalian kebijakan teknis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan pendapatan;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai denganbidang tugas dan fungsinya.

Adapaun Susunan Organisasi Badan Pendaptan Daerah sebagai berikut ;

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, terdiri dari ;
   i) Subbagian Umum dan Kepegaian
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah ;
   i) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
   ii) Subbidang Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Pajak dan Retribusi Daerah
d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
   i) Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Sistem Administrasi Pelayanan pajak dan Retribusi Daerah
   ii) Subbidang Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah ;
   i) Subbidang basis Data Pajak dan Retribusi Darah ;
   ii) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
   i) Kepala UPTD;
   ii) Subbagian Tata Usaha;
   iii) Seksi Pendapatan dan Penetapan;
   iv) Seksi Pembukuan dan Penagihan
   v) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Uraian Tugas Kelompok Bidang Badan Pendapatan Daerah dan UPTD.

a. Bidang Perencanaan dan Pengemabangan Pendapatan Daerah ;
- Perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah; perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah; dan
- Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.

b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah
- Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- Pelaporan pendapatan daerah; dan
- Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

- Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- Melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal; dan
- Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- Melakukan identifikasi dan inventarisasi data PAD
- Melakukanpengolahan dan analisis data PAD
- Memberikan Recomendasi mengenai PAD
- Melakukan pemantauan dan evaluasi PAD
- Menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Melakukan analisis alternatif pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Menyusun rekomendasi hasil analisis pengembangan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif pengembangan sistem informasi keuangan
- Menyajikan insformasi keuangan

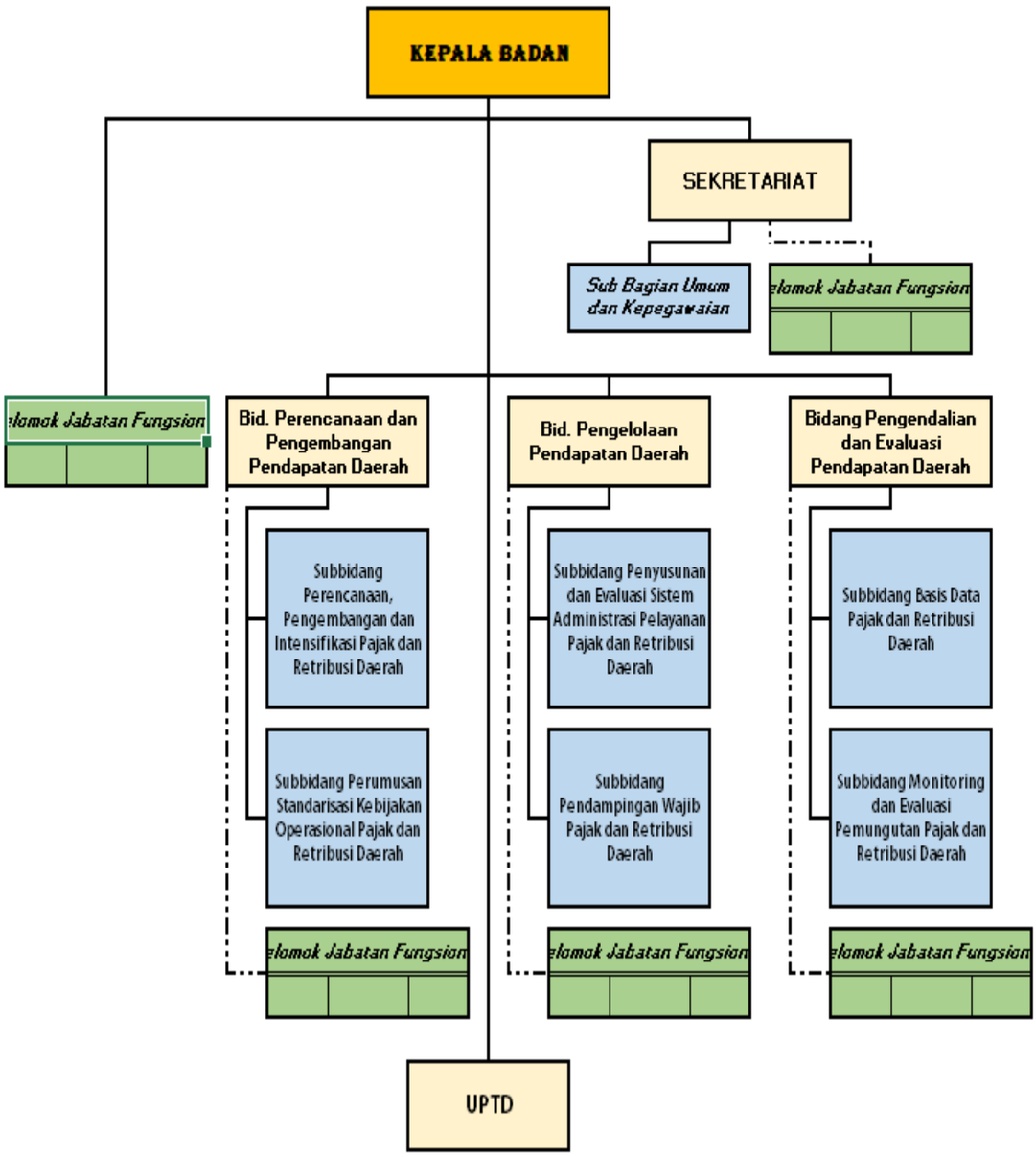
e. Unit Pelaksanan Teknis Daerah. Berdasarkan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah. Maka UPTD. Bapenda terdiri dari :

1. UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Bulungan
2. UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah tarakan
3. UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan
4. UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Malinau
5. UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Tideng Pale

UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
Untuk melaksanakan tugas, UPTD Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendapatan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

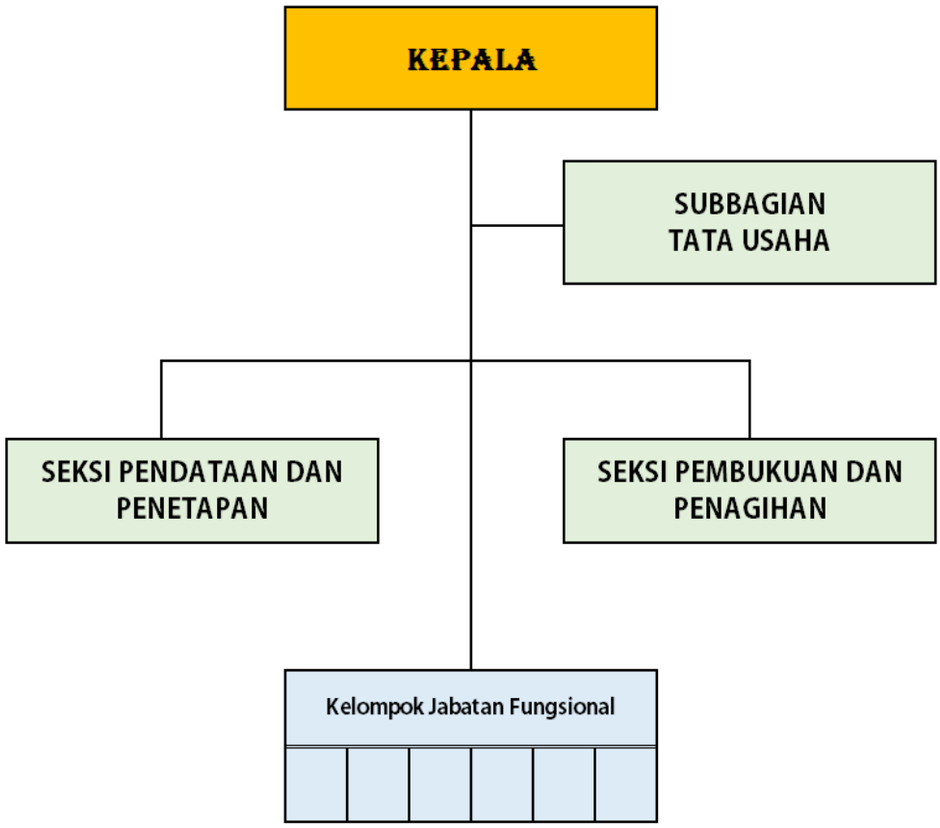
Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD. Bapenda, sebagaimana disajikan pada bagan berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023

Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 125 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 153 Orang Pegawai Honorer (Non PNS). Jumlah Pegawai tersebut (PNS dan Non PNS), tersebar di BAPENDA dan UPTD. Bapenda yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian jumlah pegawai (PNS) berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana (PNS)

No	INSTANSI / Unit Kerja	Eselon (Laiki/Perempuan)										Jumlah
		II		III		IV		Jafung		Pelaksana		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	BAPENDA	1	-	2	1	6	3	4	0	11	13	**41**
2	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tarakan	-	-	1	-	3	0	-	-	12	9	**25**
3	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Bulungan	-	-	1	-	2	1	-	-	10	4	**18**
4	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Nunukan	-	-	1	-	3	0	-	-	9	3	**16**
5	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Malinau	-	-	1	-	3	0	-	-	7	5	**16**
6	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tana Tidung	-	-	1	-	1	1	-	-	2	4	**9**
Jumlah		**1**	**0**	**7**	**1**	**18**	**5**	**4**	**0**	**51**	**38**	**125**

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025

Tabel 2.2 Data Pegawai Non PNS

No	Unit Kerja	Jumlah Non PNS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BAPENDA	12	5	17
2	UPTD. BAPENDA TARAKAN	16	26	42
3	UPTD. BAPENDA BULUNGAN	19	13	32
4	UPTD. BAPENDA NUNUKAN	20	9	29
5	UPTD. BAPENDA MALINAU	13	8	21
6	UPTD. BAPENDA TANA TIDUNG	8	4	12
Jumlah		**88**	**65**	**153**

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kondisi kurang ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, yaitu 1 Jabatan Eselon III pada BADAN PENDAPATAN DAERAH, serta 1 Jabatan Eselon IV pada UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Tideng Pale. Penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal, sagat diperlukan guna mendapatkan kondisi SDM yang ideal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Sedangkan keberadaan Pegawai Honorer / Non PNS yang ada pada Bapenda dan UPTD. Bapenda secara jumlah telah mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan petugas administrasi lainnya. Karena jumlah pegwai honorer tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu : a. Tenaga Administrasi ; b. Petugas Pegamanan Aset / Penjaga Kantor ; c. Petugas Kebersihan (Cleaning Service)

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah sebanyak 125 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	INSTANSI / UNIT KERJA	Pendidikan PNS										Jumlah
		S3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SLTA	SLTP	SD	
1	BAPENDA	1	8	20	2	8	-	-	2	-	-	41
2	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tarakan	-	-	14		2	-	-	9	-	-	25
3	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Bulungan	-	2	3		6	-	-	7	-	-	18
4	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Nunukan	-	1	6		3	-	-	6	-	-	16
5	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Malinau	1	4	3	1	6	-	-	1	-	-	16
6	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tana Tidung	-	1	4	-	3	-	-	1	-	-	9
	Jumlah	2	16	50	3	28	-	-	26	-	-	125
	Presentase	2%	13%	40%	2%	22%			21%			100%

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sarjan (S-1) dengan persentae mencapai 41%, hal ini mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Namun demikian terdapat 21% PNS dengan jenajang Pendidikan SLTA, hal ini memerlukan perhatian dalam hal peningkatan kapasitas SDM Bapenda dan UPTD. Bapenda.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data Pegawai berdasarkan Kelompok Usia

No	INSTANSI / UNIT KERJA	Rentang Usia				Jumlah
		< 30 Tahun	30 - 39 Tahun	40 - 49 Tahun	≥ 50 Tahun	
1	BAPENDA	5,00	17,00	11,00	8,00	**41,00**
2	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tarakan	1,00	7,00	11,00	6,00	**25,00**
3	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Bulungan	2,00	3,00	9,00	4,00	**18,00**
4	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Nunukan	1,00	3,00	8,00	4,00	**16,00**
5	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Malinau	1,00	7,00	8,00	-	**16,00**
6	UPTD. BAPENDA Kelas A. Wil Tana Tidung	1,00	3,00	4,00	1,00	**9,00**
	Jumlah	**11,00**	**40,00**	**51,00**	**23,00**	**125,00**
	Presentase	**9%**	**32%**	**41%**	**18%**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bapenda Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 40 sd 49 Tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini, dengan persentase 41% atau sejumlah 51 Orang Pegawai Negeri Sipil yang berada di Induk dan UPTD. Bapenda Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan rentang usia 30 sd 39 Tahun berada di urutan kedua dengan persentase 32% atau sejumlah 40 Orang. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik pada BAPENDA. Namun demikian diperlukan

perencanaan kebutuhan pegawai terhadap sejumlah pegawai yang akan memasuki masa purna tugas, sehingga diperlukan penambahan sejumlah Pegawi Negeri Sipil dibeberapa Jabatan yang akan ditinggalkan oleh PNS yang memasuki masa pensiun.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut, diantaranya

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah Sapras		Jmlh	Keterangan
		Lyk	Td Lyk		
1	*Gedung Kantor Bapenda*	0	1	1	*BAPENDA*
	Gedung Kantor UPTD. Bapenda	2	3	5	*UPTD. Bapenda &SAMSAT*
2	*Kendaraan Jabatan dan Operasional Roda 4*	5	2	7	*BAPENDA*
3	*Kendaraan Jabatan / Operasional Roda 2*	10	6	16	*BAPENDA*
4	*Komputer Server*	2		2	*BAPENDA*
5	*Kompter All in One*	19	8	27	*BAPENDA*
6	*Laptop*	12	8	20	*BAPENDA*
7	*Meja Kerja*	52	5	57	*BAPENDA*
8	*UPS Server*	1	1	2	*BAPENDA*
9	*Televisi*	4	1	5	*BAPENDA*
10	*Pendingin ruangan*	7	3	10	*BAPENDA (Ac Central)*
11	*Printer Dot Matrik*	3	4	7	*BAPENDA*
12	*Microphone*	1		1	*BAPENDA (1 SET)*
13	*Sound Sistem*	2		2	*BAPENDA*
14	*CCTV*	2	2	4	*BAPENDA*
15	*Kursi Kerja Pejabat / Petugas*	53		53	*BAPENDA*
16	*Kursi hadap*	26	6	32	*BAPENDA*
17	*Kursi Rapat*	10	6	16	*BAPENDA*
18	*Sofa Tamu*	1	2	3	*BAPENDA*
19	*Kulkas / Lemari Pendigin*	4		4	*BAPENDA*
20	*Mesin Tik*		2	2	*BAPENDA*
21	*Mesin Penghacur Kertas*		3	3	*BAPENDA*
22	*Scanner*	2		2	*BAPENDA*
23	*Printer Deskjet*	17	8	25	*BAPENDA*
24	*Mesin Perforasi*	2	2	4	*BAPENDA*
25	*Proyektor*		1	1	*BAPENDA*

No	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah Sapras		Jmlh	Keterangan
		Lyk	Td Lyk		
26	Mesin Absensi	1		1	BAPENDA
27	Rak Arsip	3	2	5	BAPENDA
28	Gudang Arsip		1	1	BAPENDA
29	Gudang SKPD		1	1	BAPENDA
30	Ruang rapat		1	1	BAPENDA
31	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	10	7	17	UPTD. Tarakan
32	Kendaraan Dinas Operasional R 4	4	1	5	UPTD. Tarakan
33	Ac Split / AC Standing Floor	22	23	45	UPTD. Tarakan
34	Flow Meter	1		1	UPTD. Tarakan
35	Laptop	12		12	UPTD. Tarakan
36	Televisi	4	5	9	UPTD. Tarakan
37	Printer Dot Matrik dan Deksjet	20	21	41	UPTD. Tarakan
38	Sound System	1		1	UPTD. Tarakan
39	Mini PC	1		1	UPTD. Tarakan
40	Komputer PC / All In One	7		7	UPTD. Tarakan
41	Note Book		5	5	UPTD. Tarakan
42	Monitor	15	18	33	UPTD. Tarakan
43	Projecktor		1	1	UPTD. Tarakan
44	Mesin Genset		1	1	UPTD. Tarakan
45	Camera Conference, Kamera Elektronik, Camera Vido	13	15	28	UPTD. Tarakan
46	Gedung Bangunan Kantor	1		1	UPTD. Tana Tideng
47	Kend. Oprasnl / Jabatan R4	3	1	4	UPTD. Tana Tideng
48	Kend Oprasional/Jabatan R2	4		4	UPTD. Tana Tideng
49	Printer Dot Matrik / Deksjet	6	6	12	UPTD. Tana Tideng
50	Mesin Fotocopy Fortable		1	1	UPTD. Tana Tideng
51	CCTV	4	3	7	UPTD. Tana Tideng
52	AAC Split	2	2	4	UPTD. Tana Tideng
53	Kipas Angin	2	2	4	UPTD. Tana Tideng
54	Televisi	4		4	UPTD. Tana Tideng
55	Microphone dan Soaund Sistem	4		4	UPTD. Tana Tideng

No	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah Sapras		Jmlh	Keterangan
		Lyk	Td Lyk		
56	*Komputer All In One dan Laptop*	4	3	7	*UPTD. Tana Tideng*
57	*Mesin Genset*	1		1	*UPTD. Tana Tideng*
58	*Meja Layanan Samsat 1 Set*	1		1	*UPTD. Tana Tideng*
59	*Kursi Tunggu Wajib Pajak*	4		4	*UPTD. Tana Tideng*
60	*Kursi Kerja Pejabat / Petugas*	17		17	*UPTD. Tana Tideng*
61	*Kursi Rapat*	10	10	20	*UPTD. Tana Tideng*
62	*Kursi Staf*	12		12	*UPTD. Tana Tideng*
63	*Sofa Tamu*	1		1	*UPTD. Tana Tideng*
64	*Meja Kerja*	12		12	*UPTD. Tana Tideng*
65	*Kendaraan Jabatan / Operasional R2*	8	1	9	*UPTD. Nunukan*
66	*Kendaraan Jabatan / Operasinal R4*	3	1	4	*UPTD. Nunukan*
67	*AC / Pendingin ruangan*	15		15	*UPTD. Nunukan*
68	*Printer Dotmatik dan Deskjet*	28	1	29	*UPTD. Nunukan*
69	*Laptop / Notebook*	12	2	14	*UPTD. Nunukan*
70	*Monitor, Televisi atau Alat Display Lainnya*	20		20	*UPTD. Nunukan*
71	*Mic Conference dan sound system*	2		2	*UPTD. Nunukan*
72	*Komputer Jaringan*	10		10	*UPTD. Nunukan*
73	*Komputer All In One / Komputer Lainnya*	9		9	*UPTD. Nunukan*
74	*Camera Conference, Kamera Elektronik, Camera Vido*	3		3	*UPTD. Nunukan*
75	*Proyektor*	1		1	*UPTD. Nunukan*
76	*Mebelair (Meja, kursi, Rak arsip, Kursi Kerja, Kursi Tunggu, Meja Layanan)*	80	23	103	*UPTD. Nunukan*
77	*Gedung Kantor UPTD Bulungan*		1	1	*UPTD. Bulungan*
78	*Gedung Kantor SAMSAT Pembantu Bunyu*		1	1	*UPTD. Bulungan*
79	*Kendaraan Dinas /Operasional R4*	2	4	6	*UPTD. Bulungan*
80	*Kendaraan Dinas /Operasional R2*	8	13	21	*UPTD. Bulungan*

No	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah Sapras		Jmlh	Keterangan
		Lyk	Td Lyk		
81	*Ac Split / AC Standing Floor*	*14*	*8*	*22*	*UPTD. Bulungan*
82	*Komputer All In One atau komputer lainnya*	*5*	*5*	*10*	*UPTD. Bulungan*
83	*Televisi atau Alat Diplay Liannya*	*2*	*1*	*3*	*UPTD. Bulungan*
84	*Kursi Kerja, Kursi Tunggu, Kursi hadap dan Kursi Lainnya*	*70*	*15*	*85*	*UPTD. Bulungan*
Jumlah		**735**	**280**	**1015**	**-**
Presentase		**72%**	**28%**	**100%**	

Sumber Data BMD Bapenda Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara cukup layak, namun kondisinya belum ideal.

- Ruang rapat menjadi satu bagian dengan Ruang Pimpinan, hanya dipisahkan oleh kisi-kisi ruangan non permanen
- Ruang server yg kurang memadai
- Ruang penyimpanan benda berharga (SKPD), kurang memadai.
- Tidak ada ruang tamu / ruang tunggu
- Masih terdapat PNS dan Pegawai P3K / Honorer yang tidak memiliki meja kerja, mengingat kondisi ruangan yang tidak mencukupi untuk menampung semua Pegawai Bapenda ASN maupun Non ASN
- Perlatan komputer yang harus dilakukan peremajaan
- Ruang Pelayanan SAMSAT yang tidak memenuhi standar minimal pelayanan Publik
- Gudang Arsip SAMSAT di yang berada di UPTD. Bapenda Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara tidak memadai krn over kapasitas berkas kendaraan yang ada.
- Peralatan jaringan komputer dan peralatan elektronik lainnya yang digunakan dalam pelayanan publik di setiap SAMSAT kurang memadai.

Hal ini dikarenakan karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak**,** penghapusan aset tidak layak**,** serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebutuhan sarana dan Prasarana yang dibutuhkan BAPENDA dan UPTD Bapenda Provinsi kalimantan Utara, antara lain ;

- Gedung Kantor BAPENDA yang berdiri sendiri, tidak menjadi satu bagian dengan Gedung gadis atau gabungan dinas, mengingat terdapat kebutuhan gedung / ruangan bagi Kantor TIM Pembina SAMSAT Tingkat Provinsi.
- Gedung UPTD. BAPENDA / SAMSAT di kabupaten dan Kota, dan ruang layanan SAMSAT yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- Ruang Arsip dan Cek Fisik Kendaraan yang berada di SAMSAT Kabupaten/Kota.
- Komputer Jaringan, Printer yang perlu diremajakan.
- Server, UPS dan Peralatan Jaringan
- Ruang tunggu dan pendingin ruangan layanan SAMSAT
- Kendaraan Dinas dan Operasional baik Roda dua maupun Roda Empat
- Perlatan Pendukung Pengihan Pajak Daerah
- Mebelair pada UPTD dan Layanan SAMSAT
- Peralatan Mesin dan Elekronik lainnya

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daeran Provinsi kalimantan Utara

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	83,69%	102,20%	115,47%	102,14%	93,29%	102,20%	115,47%	102,14%	93,29%	102,20%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	A	A	A		B	B	B	A		100%	75%	75%	100%

Tabel 2.7
Realisasi Penerimaan BAPENDA 2020 sd 2024

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah		**411.749.287.331**	**348.949.836.778**	**84,75%**	**430.384.170.522**	**392.686.405.543**	**91,24%**	**505.227.578.248**	**596.780.850.288**	**118,12%**	**672.259.678.341**	**717.253.715.401**	**106,69%**	**816.210.042.959**	**702.421.804.653**	**86,06%**
1	PKB	85.000.000.000	74.007.757.312	87,07%	93.500.000.000	78.039.743.300	83,46%	78.700.000.000	90.636.247.485	115,17%	95.000.000.000	96.605.027.400	101,69%	95.000.000.000	102.229.073.600	107,61%
2	BBNKB	80.000.000.000	73.824.923.094	92,28%	88.000.000.000	84.302.053.100	95,80%	95.000.000.000	106.208.357.517	111,80%	115.000.000.000	121.111.532.300	105,31%	100.000.000.000	123.768.945.200	123,77%
3	PBBKB	205.249.287.331	151.370.797.485	73,75%	203.500.000.000	181.615.199.850	89,25%	280.000.000.000	342.313.183.234	122,25%	400.000.000.000	442.532.752.438	110,63%	550.000.000.000	471.835.087.950	85,79%
4	P AP	3.000.000.000	2.352.200.180	78,41%	3.300.000.000	2.901.511.614	87,92%	3.300.000.000	3.360.703.033	101,84%	3.520.000.000	3.242.380.244	92,11%	4.000.000.000	4.588.697.903	114,72%
5	Pajak Rokok	38.500.000.000	47.394.158.707	123,10%	42.084.170.522	45.827.897.679	108,90%	48.227.578.248	54.262.359.019	112,51%	58.739.678.341	53.762.023.019	91,53%	65.210.042.959	-	0,00%
6	Pajak Alat Berat			0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.000.000.000	-	0,00%
Retribusi Daerah		**5.065.000.000**	**4.856.242.203**	**95,88%**	**5.750.000.000**	**6.212.686.828**	**108,05%**	**7.000.000.000**	**7.044.867.301**	**100,64%**	**21.201.750.303**	**17.156.585.673**	**80,92%**	**20.200.000.000**	**20.055.000.000**	**99,28%**
1	Jasa Kepelabuhan	4.400.000.000	4.136.545.563	94,01%	5.000.000.000	5.204.324.661	104,09%	6.050.000.000	5.840.139.397	96,53%	10.000.000.000	6.632.534.853	66,33%	10.000.000.000		0,00%
2	Jasa Usaha	415.000.000	423.901.440	102,14%	500.000.000	682.880.767	136,58%	850.000.000	1.083.272.904	127,44%	11.000.000.000	10.384.070.820	94,40%	10.000.000.000	19.605.000.000	196,05%
3	Perizinan Tertentu	250.000.000	295.795.200	118,32%	250.000.000	325.481.400	130,19%	100.000.000	121.455.000	121,46%	201.750.303	139.980.000	69,38%	200.000.000	450.000.000	225,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		**10.114.672.311**	**7.455.831.910**	**73,71%**	**8.205.702.460**	**8.205.702.460**	**100,00%**	**9.088.203.219**	**9.088.203.219**	**100,00%**	**37.088.203.219**	**10.114.672.311**	**27,27%**	**10.114.672.311**	**11.371.469.793**	**112,43%**
Pendapatan Lain - lain		**220.015.750.000**	**227.257.519.139**	**103,29%**	**219.532.500.000**	**270.698.928.473**	**123,31%**	**198.625.273.052**	**200.574.165.878**	**100,98%**	**225.625.273.052**	**235.614.622.081**	**104,43%**	**220.015.750.000**	**221.253.952.518**	**100,56%**
Jumlah		**646.944.709.642**	**588.519.430.030**	**90,97%**	**663.872.372.982**	**677.803.723.304**	**102,10%**	**719.941.054.519**	**813.488.086.686**	**112,99%**	**956.174.904.915**	**980.139.595.466**	**102,51%**	**1.066.540.465.270**	**955.102.226.964**	**89,55%**

Sumber : Olah Data BAPENDA Prov. Kaltara Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Realisasi PAD tahun 2020 tercatat sebesar Rp557,6 miliar dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp815,6 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan sekitar 10,5% per tahun, mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat basis penerimaan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta program pemutihan dan relaksasi pajak yang dilaksanakan pada 2023–2024. Meski menunjukkan peningkatan yang positif, pencapaian PAD belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target PAD setiap tahun berada di kisaran Rp950 miliar hingga Rp1,1 triliun, namun realisasi rata-rata hanya mencapai 55–80% dari target tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2024 target PAD ditetapkan sebesar Rp1,033 triliun, sementara realisasi hanya sebesar Rp815,6 miliar atau sekitar 79%. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan signifikan antara target yang bersifat ambisius dengan realisasi yang mampu dicapai di lapangan. Faktor utama yang memengaruhi kesenjangan tersebut antara lain adanya penyesuaian regulasi terkait tarif pajak, implementasi opsen pajak, serta penghapusan pajak progresif yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan. Di sisi lain, kontribusi pajak daerah, khususnya dari PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok, tetap menjadi tulang punggung PAD. Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan penyesuaian target yang lebih realistis, memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum yang lebih efektif agar capaian PAD lebih optimal.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	30.873.339.750	39.814.376.665	49.789.869.103	61.111.469.755		26.907.846.207	37.232.282.235	49.336.942.633	59.593.315.570	-	87%	94%	99%	98%
Prog. Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	864.172.500	-	-	-	-	861.067.451	-	-	-	-	99,64%	-
Prog. Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	2.726.670.000	2.907.522.820	4.189.176.879	4.857.789.840		1.019.039.338	2.402.242.551	4.057.979.026	4.670.208.379	-	37%	83%	97%	96%

Sumber BAPENDA Prov. Kaltara

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara umumnya mencakup beberapa katagori, antara lain Wajib Pajak, Pelaku Usaha, Masyarakat Umum, Instansi Pemerintah/Lembaga dan Investor. Kelompok Sasaran ini yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode perencanaan strategis;

1) Wajib Pajak, Individu atau Badan Usaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.
2) Instansi Pemerintah dan Lembaga, Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
3) Investor: Individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak.

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	➢ *Pelayanan informasi Pembayaran Pajak Daerah;* ➢ *Pelayanan Informasi Peraturan Daerah tentang Pajak*	✓ *Wajib Pajak* ✓ *Instansi Pemerintah investor*
		➢ *Pelayanan informasi Pembayaran Retribusi Daerah;* ➢ *Pelayanan Informasi Peraturan Daerah tentang Pajak*	

Sumber BAPENDA Prov. Kaltara

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Badan Pendapatan Daerah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.(pemyesuaian narasi)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan SAMSAT Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah:

Tabel 2.10
Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	SATLANTAS Polda Kalimantan Utara	- Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru BBNKB I dan II - Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	- Peningkatan Realisasi PAD melalui Penambahan Objek Pajak Kendaraan Bermotor - Meningkatnya Kendaraan Bermotor yang terintegrasi
2.	BPD Kaltimtara	Pelayanan Kasir di seluruh Lokat Pelayanan SAMSAT	Akuntabilitas dan Transfarasi Layanan SAMSAT
3.	PT. Jasaraharja Persero. Tbk	Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Peningkatan Pelayanan Publik Pada Wajib Pajak
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	- Sewa Ruangan - Sewa Pemakaian Fasilitas/Perlengkapan Gedung	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	- Sewa rumah dinas SMA/SMK - Sewa Kantin / Sewa Ruangan	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
6.	RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	Pelayanan RSUD dr. Yusuf SK Tarakan	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
7.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Sewa Rumah Dinas	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah

8.	Dinas PURP-Perkim Provinsi Kalimantan Utara	- Rusun ASN - Sewa Kantin / Sewa Ruangan	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
9.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga)	Sewa Rumah Dinas	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnsi Kalimantan Utara	Retribusi IMTA/RPTKA	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara	- Retribusi Pelayanan Pasar - Sewa Mess Penginapan Sebatik	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
12.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	- Pelayanan Pelabuhan Tengkayu I dan nunukan(Liem Hie Djung)	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Pelayanan Pelabuhan Tengkayu II	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
14.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	- Pengelolaan Kekayaan Daerah - Sewa Rumah Dinas	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
15.	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara	- Sewa bangunan/ruangan di Badan Penghubung Jakarta oleh Bank kaltimtara - Penginapan / Mess Jakarta - Sewa Ruang Pertemuan Convention Hall	Peningkatan Realisasi PAD melalui Retribusi Daerah
16.	BPKPAD Kota Tarakan	Penagihan PKB, BBNKB, Dan Pajak MBLB Beserta Opsen Pajak	Meningkatkan realisasi PAD provinsi dan PAD kabupaten kota

17.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan	Penagihan PKB, BBNKB, Dan Pajak MBLB Beserta Opsen Pajak	Meningkatkan realisasi PAD provinsi dan PAD kabupaten kota
18.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan	Penagihan PKB, BBNKB, Dan Pajak MBLB Beserta Opsen Pajak	Meningkatkan realisasi PAD provinsi dan PAD kabupaten kota
19.	BPKAD Kabupaten Malinau	Penagihan PKB, BBNKB, Dan Pajak MBLB Beserta Opsen Pajak	Meningkatkan realisasi PAD provinsi dan PAD kabupaten kota
20.	BPKAD Kabupaten KTT	Penagihan PKB, BBNKB, Dan Pajak MBLB Beserta Opsen Pajak	Meningkatkan realisasi PAD provinsi dan PAD kabupaten kota

Sumber: Olah Data BAPENDA Prov. Kaltara Tahun 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama.

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga melibatkan berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup:

1. Instansi Pemerintah Daerah: Ada 16 perangkat daerah penghasil (selain Badan Pendapatan Daerah) Pendapatan Asli Daerah
2. Bank dan Lembaga Keuangan: Untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah, kantor pos, e-commerce dll
3. Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang menagani Pendapatan Asli Daerah

Dengan kemitraan ini diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara menjalin berbagai kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Berikut adalah narasi mengenai kerja sama Bapenda Provinsi Kalimantan Utara dengan beberapa mitra kerja sama:

1. Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan

   Bapenda juga menjalin kerja sama dengan bank-bank lokal untuk memfasilitasi sistem pembayaran pajak yang lebih efisien. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

2. Kerjasama dengan *E-Commerce*

   Bapenda menjalin Kerjasama dengan Tokopedia dalam menyediakan platform pembayaran Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran PKB secara online melalui platform Tokopedia, sehingga mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 2.11
Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
1	2	3	4
1.	Bank KALTIMTARA	*Pelayan Pembayaran Pajak dan Retribusi*	*Peningkatan PAD*
2.	*Tokopedia*	*Pelayan Pembayaran Pajak*	*Peningkatan PAD*

Sumber BAPENDA Prov. Kaltara

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

1) Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2) Belum meratanya sistem pelaporan real time yang terkoneksi dengan Bapenda secara langsung;
3) Piutang yang kenaikannya semakin signifikan dibanding dengan penerimaan dari penagihan tunggakan;
4) Terbatanya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru sita, Penilai Pajak dan PPNS);

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara antara lain sebagai berikut :

1) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah;
2) Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	*Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*	*Banyak yang menunda dan / tidak membayar pajak/retribusi*	*1. Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih rendah* *2. Kurangnya sosialisasi dan informasi pentinya membayar pajak untuk pembangunan daerah*
		Potensi pajak yang belum akurat	*1. Kondisi ekonomi masyarakat* *2. kondisi geografis yang menyulitkan untuk melakukan pendataan*

			belum optimalnya pemutahiran data potensi pajak secara berkala
		Fasilitas Objek Retribusi yang belum memadai	*rehabilitasi dan modernisasi objek-objek retribusi belum dilakukan secara berkala*
		Kurang maksimalnya pengawsan, pengendalian dan pemanfaatan Tehnologi Informasi	*1. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah* *2. Digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum diterapkan pada semua objek pajak dan retribusi* *3. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah pemangku retribusi*

Sumber: Olah Data BAPENDA Prov. Kaltara Tahun 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Badan Pendapatan Daerah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Badan Pendapatan Daerah sejauh ini perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

Pada saat Renstra Badan Pendapatan Daerah disusun, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Oleh sebab itu tidak dapat dilakukan telaahan terhadap Renstra kementerian.

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan.

Dengan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung oleh KLHS dan RTRW yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif gabi peetumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2.2.2.4 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah

kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1) Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan
2) Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

2.2.2.5 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah antara lain potensi bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan, keberadaan ekosistem mangrove dan gambut, dan potensi parawisata alam dan budaya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan Badan Pendapatan Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Badan Pendapatan Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Badan Pendapatan Daerah			Provinsi / KALTARA	Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah
			Global	Nasional	Regional		
- Potensi bonus	- Banyak yang menunda dan / tidak membayar pajak/retribusi		- Konstelasi Perdagangan Global	- Pergeseran struktur kelas Masyarakat	- Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri	- Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjuta	- Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah
Demografi	- Potensi pajak yang belum akurat		- Tata Kelola Keuangan Global	- Rendahnya kualitas sumber daya manusia	- Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara	- Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah
- Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan	- Fasilitas Objek Retribusi yang belum memadai	Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan	- Pertumbuhan Kelas Menengah	- Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	- Kurangnya pusat pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan		
- Keberadaan ekosistem mangrove dan gambut	- Masih terdapatnya kebocoran Pendapatan Asli Daereh		- Demografi Global	- Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah			
- Potensi parawisata alam dan budaya	- Kurang maksimalnya Pelayanan Pembayaran Pajak dan Retribusi		- Perkembangan Teknologi	Rendahnya produktivitas			
			- Persaingan Sumber Daya Alam				

Sumber BAPENDA Prov. Kaltara 2025-2029

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan ”

Adapun misi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:
Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mendukung misi ke-2 dan ke-3, Tujuan BAPENDA Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendpatan Daerah. Sasaran yaitu Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah. dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

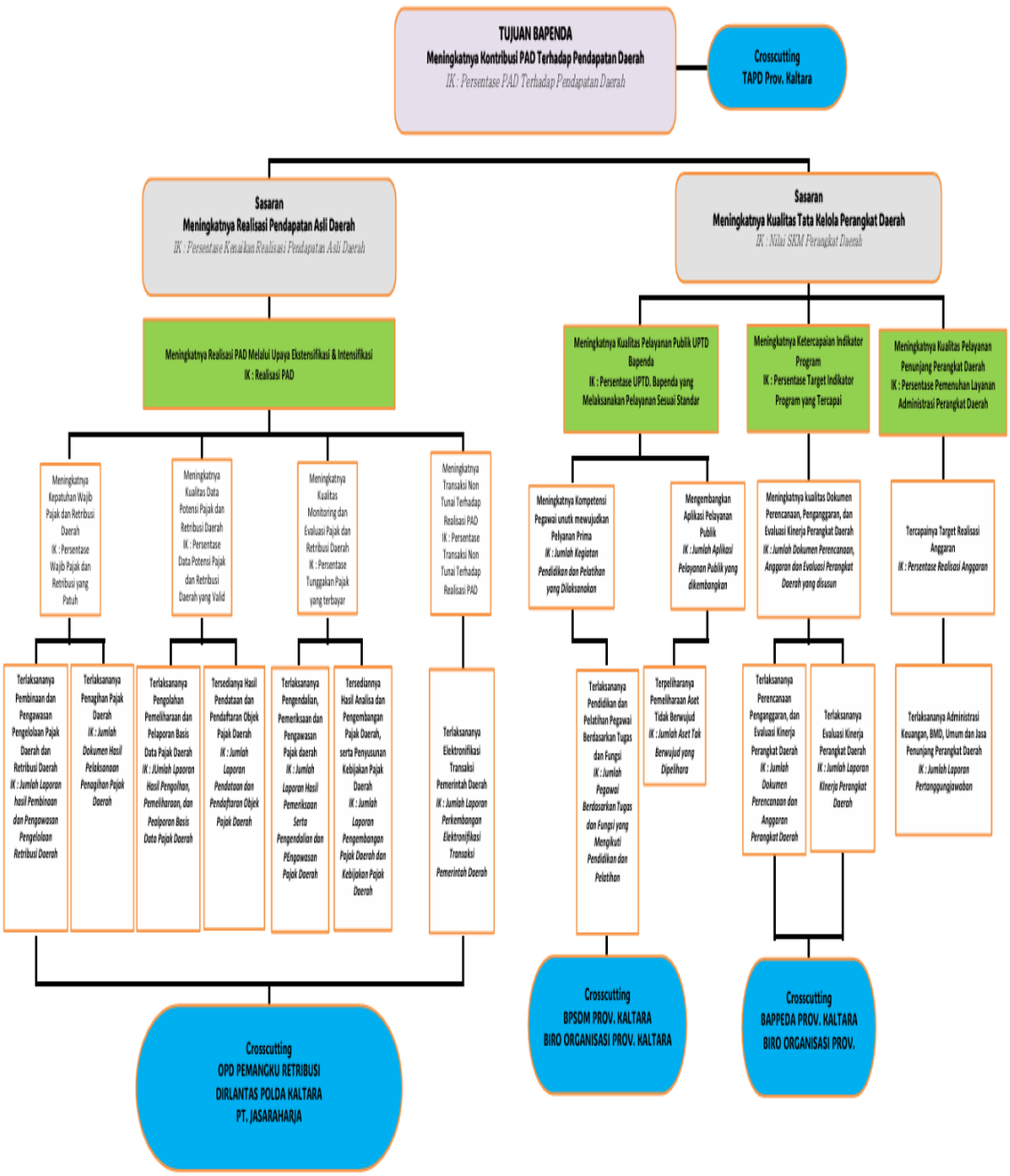
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah		*Persentase PAD terhadap Pendaptan Daerah*	*30%*	*32%*	*35%*	*37%*	*39%*	*42%*	*45%*	
Mewujudkan Trasnformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan		*Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah*	*Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	
Mewujudkan Trasnformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif		*Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah*	*Nilai SKM Perangkat Daerah*	*90,90*	*91,22*	*91,72*	*92,22*	*92,72*	*93,22*	*93,72*	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*72,01*	*75,00*	*79,50*	*81,50*	*83,00*	*85,00*	*86,50*	

Sumber: Olah Data BAPENDA Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Badan Pendapatan Daerah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar 3.1
Pohon Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara



Sumber Rentra BAPENDA 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Badan Pendapatan Daerah, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2
Penentuan Strategi Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Pengembangan kopetensi SDM baik PNS maupun P3K
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan Disiplin, peberian Reward dan Punishment

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah
(dipilih dengan tabel diatas)

No	Operasionalisasi NSPK		Arah Kebijakan RPJMD	Strategi RENSTRA PD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pengunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	
			Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Pungutan Retribusi	Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	
				Verifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Pelaksanaan Pendataan, Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	
				Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Digitalisasi sistem pelayanan Pajak Daerah dann Retribusi Daerah	

Sumber: Olah Data Bapenda Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang :

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengembangan dan penerapan platform digital dasar untuk pemungutan pajak dan retribusi.	Integrasi sistem informasi pajak dengan aplikasi database perangkat daerah penghasil PAD untuk memudahkan verifikasi data.	Implementasi integrasi sistem informasi PAD Implementasi teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan big data untuk analisis pola pembayaran pajak dengan menggunakan algoritma untuk memprediksi potensi pajak dan retribusi yang dapat diperoleh serta mendeteksi kewajiban pajak yang belum terpenuhi.	Evaluasi Penerapan digitalisasi sistem PAD	Peningkatan Efektivitas Pemungutan PAD dengan mencari cara untuk optimalisasi dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait efektivitas sistem digital yang telah diterapkan.
Ekspansi Obyek	Melakukan	Pemutakhiran database	Mengembangkan	Melakukan
Pajak dan Retribusi	identifikasi dan pemetaan potensi	Pajak dan retribusi,	kebijakan dan regulasi yang mendukung	evaluasi menyeluruh
Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber Pendapatan	Menyusun dan menguatkan regulasi Penerapan sistem monitoring pajak	Pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi	Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari kebijakan yang diterapkan	Optimalisasi PAD
Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi berbasis PAD dengan mengkaji dan merumuskan regulasi yang mempermudah proses perizinan bagi investor, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.	Penyesuaiantarif retribusi agar tetap kompetitif namun memberikan pemasukan maksimal Pengembangan sistem perizinan digital untuk mekanisme perizinan yang cepat dan transparan berbasis OSS	Implementasi sistem perizinan berbasis digital	Evaluasi pelaksanaan dari kebijakan dan penyesuaian strategi	Penguatan Investasi melalui Izin Berbasis PAD secara berkelanjutan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Badan Pendapatan Daerah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			MENINGKATNYA REALISASI PAD MELALUI UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI		Realisasi PAD (Nilai)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Transaksi Non Tunai Terhadap Realisasi PAD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Transaksi Non Tunai terhadap Realisasi PAD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0014 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			MENINGKATNYA KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM		Persentase Target Indikator Program yang Tercapai (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UPTD. BAPENDA		Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Survey Kepuasan masyarakat (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			MENINGKATNYA KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UPTD. BAPENDA	Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				BMD yang terpelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.02.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPT Bapenda Bulungan							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi		Realisasi PAD (Nilai)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda		Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Jumlah BMD yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.0.00.0.00.03.0002 - UPT Bapenda Tarakan							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			Meningkatnya Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi		Realisasi PAD (Nilai)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Layanan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
5.02.0.00.0.00.03.0003 - UPT Bapenda Nunukan							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			Peningkatan Capaian PAD melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi		Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah (Rp)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda		Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang Berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Pengadaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai Standar Regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	BMD yang Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.0.00.0.00.03.0004 - UPT Bapenda Malinau							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			PENINGKATAN CAPAIAN REALISASI PAD MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI		Realisasi PAD (Nilai)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda		Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	BMD yang Terpelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.02.0.00.0.00.03.0005 - UPT Bapenda Tana Tidung							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli daerah			Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli daerah (%)		
			Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi		Realisasi PAD (Nilai)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Keloa Perangkat Daerah			Nilai SKM Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda		Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	BMD Yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber Renstra BAPENDA 2025-2029

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

BAPENDA dan UPTD. BAPENDA KELAS A WILAYAH KABUPATEN / KOTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				65.544.731.831,00		99.797.876.975,82		108.808.861.075,60		116.524.522.000,00		129.668.942.400,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				60.708.631.831,00		92.119.260.007,89		100.252.760.459,28		107.288.169.200,00		119.538.223.040,00		
MENINGKATNYA KETERCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM	Persentase Target Indikator Program yang Tercapai (%)	100	100	80.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			80.000.000,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	900.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)				2		2		2		2			
5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	80.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	3	400.000.000,00	2	450.000.000,00		
5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00		
5.02.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.02.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	0	100	1.769.000.000,00	100	2.582.500.000,00	100	2.567.500.000,00	100	2.572.500.000,00	100	2.683.500.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPT Bapenda Bulungan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				780.000.000,00		750.000.000,00		735.000.000,00		740.000.000,00		851.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	780.000.000,00	5	750.000.000,00	5	735.000.000,00	5	740.000.000,00	5	851.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	700	0		700		700		700		700			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10		3		2		2		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	10.000.000,00	5	9.000.000,00	5	9.000.000,00	5	9.000.000,00	5	10.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		60.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10	150.000.000,00	3	60.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	3	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	700	0	0,00	700	6.000.000,00	700	6.000.000,00	700	6.000.000,00	700	6.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				824.000.000,00		1.667.500.000,00		1.667.500.000,00		1.667.500.000,00		1.667.500.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	824.000.000,00	12	1.667.500.000,00	12	1.667.500.000,00	12	1.667.500.000,00	12	1.667.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00	12	210.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				606.500.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	606.500.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	3.008.369.957,00	100	6.094.214.445,31	100	7.843.518.907,61	100	9.822.643.200,00	100	11.787.171.840,00	5.02.0.00.0.00.03.0002 - UPT Bapenda Tarakan	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				141.120.000,00		288.000.000,00		346.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	141.120.000,00	12	288.000.000,00	12	346.600.000,00	12	414.720.000,00	12	497.664.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				141.120.000,00		288.000.000,00		346.600.000,00		414.720.000,00		497.664.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	141.120.000,00	12	288.000.000,00	12	346.600.000,00	12	414.720.000,00	12	497.664.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.473.462.082,00		2.167.200.000,00		2.600.640.000,00		3.120.768.000,00		3.744.921.600,00		
Jumlah Layanan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	1.473.462.082,00	7	2.167.200.000,00	7	2.600.640.000,00	7	3.120.768.000,00	7	3.744.921.600,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	441	441		529		636		762		914			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.992.000,00		33.120.000,00		39.744.000,00		47.692.800,00		57.231.360,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	31.992.000,00	1	33.120.000,00	1	39.744.000,00	1	47.692.800,00	1	57.231.360,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				372.000.000,00		446.400.000,00		535.680.000,00		642.816.000,00		771.379.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	372.000.000,00	6	446.400.000,00	6	535.680.000,00	6	642.816.000,00	6	771.379.200,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				507.139.820,00		554.400.000,00		665.280.000,00		798.336.000,00		958.003.200,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	507.139.820,00	7	554.400.000,00	7	665.280.000,00	7	798.336.000,00	7	958.003.200,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				101.330.262,00		57.600.000,00		69.120.000,00		82.944.000,00		99.532.800,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	101.330.262,00	1	57.600.000,00	1	69.120.000,00	1	82.944.000,00	1	99.532.800,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				9.000.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		24.883.200,00		29.859.840,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	9.000.000,00	12	17.280.000,00	12	20.736.000,00	12	24.883.200,00	12	29.859.840,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				452.000.000,00		1.058.400.000,00		1.270.080.000,00		1.524.096.000,00		1.828.915.200,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	441	441	452.000.000,00	529	1.058.400.000,00	636	1.270.080.000,00	762	1.524.096.000,00	914	1.828.915.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.393.787.875,00		3.639.014.445,31		4.896.278.907,61		6.287.155.200,00		7.544.586.240,00		
Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.393.787.875,00	12	3.639.014.445,31	12	4.896.278.907,61	12	6.287.155.200,00	12	7.544.586.240,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.950.000,00		31.680.000,00		38.016.000,00		45.619.200,00		54.743.040,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	19.950.000,00	12	31.680.000,00	12	38.016.000,00	12	45.619.200,00	12	54.743.040,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.326.075,00		360.000.000,00		432.000.000,00		518.400.000,00		622.080.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	230.326.075,00	12	360.000.000,00	12	432.000.000,00	12	518.400.000,00	12	622.080.000,00		
5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.800.000,00		230.400.000,00		276.480.000,00		331.776.000,00		398.131.200,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	199.800.000,00	12	230.400.000,00	12	276.480.000,00	12	331.776.000,00	12	398.131.200,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				943.711.800,00		3.016.934.445,31		4.149.782.907,61		5.391.360.000,00		6.469.632.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	943.711.800,00	12	3.016.934.445,31	12	4.149.782.907,61	12	5.391.360.000,00	12	6.469.632.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	1.999.999.947,00	100	3.047.050.099,10	100	3.731.561.699,78	100	4.426.000.000,00	100	4.883.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0003 - UPT Bapenda Nunukan	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				170.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	170.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				170.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	170.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.060.100.000,00		1.191.000.000,00		1.372.000.000,00		1.605.000.000,00		1.886.000.000,00		
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	21	1.060.100.000,00	22	1.191.000.000,00	23	1.372.000.000,00	24	1.605.000.000,00	25	1.886.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		2		3		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5		6		7		8		9			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	146	365		400		400		600		600			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	140		145		150		155		160			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	21	11.000.000,00	22	12.000.000,00	23	13.000.000,00	24	14.000.000,00	25	15.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.500.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5	110.500.000,00	6	150.000.000,00	7	175.000.000,00	8	200.000.000,00	9	225.000.000,00		
5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	45.000.000,00	2	60.000.000,00	3	80.000.000,00	4	100.000.000,00	5	120.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				160.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	160.000.000,00	12	175.000.000,00	12	200.000.000,00	12	225.000.000,00	12	250.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	30.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.600.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	146	365	3.600.000,00	400	4.000.000,00	400	4.000.000,00	600	6.000.000,00	600	6.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	140	700.000.000,00	145	750.000.000,00	150	850.000.000,00	155	1.000.000.000,00	160	1.200.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				769.899.947,00		1.656.050.099,10		2.109.561.699,78		2.521.000.000,00		2.647.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	769.899.947,00	12	1.656.050.099,10	12	2.109.561.699,78	12	2.521.000.000,00	12	2.647.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	190.000.000,00	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00		
5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.899.947,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	31.899.947,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00	12	65.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				550.000.000,00		1.417.050.099,10		1.854.561.699,78		2.250.000.000,00		2.350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	550.000.000,00	12	1.417.050.099,10	12	1.854.561.699,78	12	2.250.000.000,00	12	2.350.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	1.315.500.000,00	100	1.908.000.000,00	100	2.307.000.000,00	100	2.692.700.000,00	100	3.222.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0004 - UPT Bapenda Malinau	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				113.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	113.000.000,00	12	120.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				113.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	113.000.000,00	12	120.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				651.000.000,00		820.000.000,00		1.020.000.000,00		1.120.000.000,00		1.220.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	240	651.000.000,00	270	820.000.000,00	305	1.020.000.000,00	305	1.120.000.000,00	310	1.220.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10		10		10		10		10			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	12	36.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	37.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				78.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10	78.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	20	20.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				480.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	240	480.000.000,00	270	500.000.000,00	305	700.000.000,00	305	800.000.000,00	310	900.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				551.500.000,00		968.000.000,00		1.087.000.000,00		1.372.700.000,00		1.802.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	551.500.000,00	12	968.000.000,00	12	1.087.000.000,00	12	1.372.700.000,00	12	1.802.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	12.000.000,00	12	14.000.000,00	12	16.000.000,00	12	18.000.000,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00	12	120.000.000,00	12	140.000.000,00	12	160.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				456.500.000,00		856.000.000,00		953.000.000,00		1.216.700.000,00		1.624.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	456.500.000,00	12	856.000.000,00	12	953.000.000,00	12	1.216.700.000,00	12	1.624.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	1.148.999.954,00	100	1.506.360.023,27	100	1.537.568.318,09	100	1.709.000.000,00	100	1.812.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0005 - UPT Bapenda Tana Tidung	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.000.000,00		115.000.000,00		117.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000.000,00	12	115.000.000,00	12	117.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000.000,00		115.000.000,00		117.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000.000,00	12	115.000.000,00	12	117.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				747.000.000,00		870.000.000,00		905.000.000,00		985.000.000,00		1.070.000.000,00		
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365	1	747.000.000,00	1	870.000.000,00	0	905.000.000,00	1	985.000.000,00	0	1.070.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	121	298		300		300		300		400			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	32	34		34		35		35		40			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6		7		8		8		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	15		11		11		11		13			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		2			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	6	10.000.000,00	7	25.000.000,00	8	30.000.000,00	8	35.000.000,00	10	40.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	15	45.000.000,00	11	80.000.000,00	11	80.000.000,00	11	130.000.000,00	13	150.000.000,00		
5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2	10.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	32	34	60.000.000,00	34	85.000.000,00	35	90.000.000,00	35	90.000.000,00	40	110.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	31.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	4	60.000.000,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000,00		5.000.000,00		0,00		5.000.000,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000,00		620.000.000,00		650.000.000,00		670.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	121	298	600.000.000,00	300	620.000.000,00	300	650.000.000,00	300	670.000.000,00	400	700.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				301.999.954,00		521.360.023,27		515.568.318,09		604.000.000,00		612.000.000,00		
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12	301.999.954,00	12	521.360.023,27	12	515.568.318,09	12	604.000.000,00	12	612.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	12.000.000,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				249.999.954,00		463.360.023,27		452.568.318,09		540.000.000,00		540.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	249.999.954,00	12	463.360.023,27	12	452.568.318,09	12	540.000.000,00	12	540.000.000,00		
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	46.437.814.608,00	100	57.502.709.202,33	100	64.091.737.081,58	100	67.250.500.000,00	100	70.365.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				42.858.814.608,00		51.837.709.202,33		57.041.737.081,58		60.965.710.000,00		63.285.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	42.858.814.608,00	12	51.837.709.202,33	12	57.041.737.081,58	12	60.965.710.000,00	12	63.285.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	125	215		215		215		215		215			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				42.508.814.608,00		51.437.709.202,33		56.641.737.081,58		60.565.710.000,00		62.785.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	125	215	42.508.814.608,00	215	51.437.709.202,33	215	56.641.737.081,58	215	60.565.710.000,00	215	62.785.000.000,00		
5.02.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	500.000.000,00		
5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
BMD perangkat daerah yang terkelola sesuai regulasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
5.02.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
5.02.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		154.790.000,00		297.000.000,00		
Meningkatnya administrasi pelayanan pendapatan retribusi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)			0,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	154.790.000,00	2	297.000.000,00		
5.02.01.1.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		154.790.000,00		297.000.000,00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)			0,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	154.790.000,00	2	297.000.000,00		
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.521.000.000,00		3.735.000.000,00		5.070.000.000,00		4.150.000.000,00		4.595.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	7	2.521.000.000,00	7	3.735.000.000,00	7	5.070.000.000,00	7	4.150.000.000,00	7	4.595.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	8		8		8		8		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	300		400		410		420		430			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	375	365		730		730		730		750			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	117	6		8		6		7		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4					1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	15		15		20		15		15			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	15	5.000.000,00	15	15.000.000,00	20	20.000.000,00	15	15.000.000,00	15	20.000.000,00		
5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		555.000.000,00		1.485.000.000,00		520.000.000,00		605.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	117	6	60.000.000,00	8	555.000.000,00	6	1.485.000.000,00	7	520.000.000,00	5	605.000.000,00		
5.02.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		
5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				900.000.000,00		950.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	8	900.000.000,00	8	950.000.000,00	8	1.200.000.000,00	8	1.200.000.000,00	10	1.300.000.000,00		
5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				800.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	7	800.000.000,00	7	900.000.000,00	7	900.000.000,00	7	900.000.000,00	7	1.000.000.000,00		
5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	375	365	6.000.000,00	730	15.000.000,00	730	15.000.000,00	730	15.000.000,00	750	20.000.000,00		
5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	300	750.000.000,00	400	1.300.000.000,00	410	1.400.000.000,00	420	1.500.000.000,00	430	1.600.000.000,00		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.058.000.000,00		1.730.000.000,00		1.730.000.000,00		1.880.000.000,00		2.088.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.058.000.000,00	12	1.730.000.000,00	12	1.730.000.000,00	12	1.880.000.000,00	12	2.088.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)				12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	18.000.000,00		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				800.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	800.000.000,00	12	850.000.000,00	12	850.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.200.000.000,00		
5.02.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	100	100	1.370.999.998,00	100	1.346.463.230,88	100	667.334.956,22	100	765.000.000,00	100	1.330.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPT Bapenda Bulungan	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	40	100.000.000,00	40	110.000.000,00	40	110.000.000,00	40	110.000.000,00	40	110.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5		5		5		5		5			
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				471.000.000,00		470.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		160.000.000,00		
Jumlah BMD yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	471.000.000,00	1	470.000.000,00	1	60.000.000,00	1	55.000.000,00	2	160.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1											
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		450.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	450.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	3	100.000.000,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				21.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	21.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	2	60.000.000,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				799.999.998,00		766.463.230,88		497.334.956,22		600.000.000,00		1.060.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	799.999.998,00	2	766.463.230,88	2	497.334.956,22	2	600.000.000,00	2	1.060.000.000,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.999.998,00		300.000.000,00		197.334.956,22		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	199.999.998,00	10	300.000.000,00	10	197.334.956,22	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00		
5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000,00		216.463.230,88		150.000.000,00		150.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	300.000.000,00	2	216.463.230,88	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	250.000.000,00	2	200.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Nilai SKM UPTD. BAPENDA (Nilai)	100	100	642.529.996,00	100	2.470.400.000,00	100	2.964.480.000,00	100	3.557.376.000,00	100	3.664.051.200,00	5.02.0.00.0.00.03.0002 - UPT Bapenda Tarakan	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53.000.000,00		316.800.000,00		380.160.000,00		456.192.000,00		547.430.400,00		
Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	53.000.000,00	5	316.800.000,00	5	380.160.000,00	5	456.192.000,00	5	547.430.400,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				27.000.000,00		18.000.000,00		21.600.000,00		25.920.000,00		31.104.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25	25	27.000.000,00	25	18.000.000,00	25	21.600.000,00	25	25.920.000,00	25	31.104.000,00		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26.000.000,00		298.800.000,00		358.560.000,00		430.272.000,00		516.326.400,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	26.000.000,00	5	298.800.000,00	5	358.560.000,00	5	430.272.000,00	5	516.326.400,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.000.000,00		594.800.000,00		713.760.000,00		856.512.000,00		423.014.400,00		
Jumlah BMD yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	120.000.000,00	15	594.800.000,00	15	713.760.000,00	15	856.512.000,00	15	423.014.400,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		350.000.000,00		420.000.000,00		504.000.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	350.000.000,00	1	420.000.000,00	1	504.000.000,00	0	0,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		248.832.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	25	25	120.000.000,00	25	144.000.000,00	25	172.800.000,00	25	207.360.000,00	25	248.832.000,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		24.883.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	0	0,00	6	14.400.000,00	6	17.280.000,00	6	20.736.000,00	6	24.883.200,00		
5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		72.000.000,00		86.400.000,00		103.680.000,00		124.416.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	103.680.000,00	1	124.416.000,00		
5.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		24.883.200,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	0	0,00	15	14.400.000,00	15	17.280.000,00	15	20.736.000,00	15	24.883.200,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				469.529.996,00		1.558.800.000,00		1.870.560.000,00		2.244.672.000,00		2.693.606.400,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	469.529.996,00	1	1.558.800.000,00	1	1.870.560.000,00	1	2.244.672.000,00	1	2.693.606.400,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0		1		1		1		1			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				275.529.996,00		1.263.600.000,00		1.516.320.000,00		1.819.584.000,00		2.183.500.800,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	275.529.996,00	19	1.263.600.000,00	19	1.516.320.000,00	19	1.819.584.000,00	19	2.183.500.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		24.883.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0	0,00	1	14.400.000,00	1	17.280.000,00	1	20.736.000,00	1	24.883.200,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.000.000,00		187.200.000,00		224.640.000,00		269.568.000,00		323.481.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	56.000.000,00	1	187.200.000,00	1	224.640.000,00	1	269.568.000,00	1	323.481.600,00		
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.000.000,00		14.400.000,00		17.280.000,00		20.736.000,00		24.883.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	72.000.000,00	1	14.400.000,00	1	17.280.000,00	1	20.736.000,00	1	24.883.200,00		
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.000.000,00		79.200.000,00		95.040.000,00		114.048.000,00		136.857.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	66.000.000,00	15	79.200.000,00	15	95.040.000,00	15	114.048.000,00	15	136.857.600,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	100	100	380.000.000,00	100	875.000.000,00	100	851.000.000,00	100	927.000.000,00	100	988.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0003 - UPT Bapenda Nunukan	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00		160.000.000,00		190.000.000,00		
Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang Berlaku	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	44	70.000.000,00	47	100.000.000,00	50	130.000.000,00	53	160.000.000,00	56	190.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	6		7		8		9		10			
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	44	50.000.000,00	47	75.000.000,00	50	100.000.000,00	53	125.000.000,00	56	150.000.000,00		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	6	20.000.000,00	7	25.000.000,00	8	30.000.000,00	9	35.000.000,00	10	40.000.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		170.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai Standar Regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	20	-	0,00	1	170.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-		1		-		-		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-		1		1		1		1			
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	20	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.000.000,00		605.000.000,00		651.000.000,00		697.000.000,00		728.000.000,00		
BMD yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	310.000.000,00	1	605.000.000,00	1	651.000.000,00	1	697.000.000,00	1	728.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	-		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	-		-		-		-		-			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17		18		19		20		21			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				160.000.000,00		380.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17	160.000.000,00	18	380.000.000,00	19	385.000.000,00	20	390.000.000,00	21	400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	-	0,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	100	100	696.417.371,00	100	965.328.007,00	100	1.001.012.496,00	100	795.950.000,00	100	808.500.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0004 - UPT Bapenda Malinau	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250.000.000,00		17.250.000,00		19.500.000,00		22.450.000,00		23.500.000,00		
Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		100	250.000.000,00		17.250.000,00		19.500.000,00		22.450.000,00		23.500.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		9											
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		10		12		14		16		18			
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				135.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		9	135.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		100	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		17.250.000,00		19.500.000,00		22.450.000,00		23.500.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		10	15.000.000,00	12	17.250.000,00	14	19.500.000,00	16	22.450.000,00	18	23.500.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		
Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		15	275.000.000,00	15	560.000.000,00	15	560.000.000,00	15	560.000.000,00	15	560.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	45.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.417.371,00		388.078.007,00		421.512.496,00		213.500.000,00		225.000.000,00		
BMD yang Terpelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	171.417.371,00	1	388.078.007,00	1	421.512.496,00	1	213.500.000,00	1	225.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1									
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)						20							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						3							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	15		15		15		15		15			
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.417.371,00		138.078.007,00		141.512.496,00		143.500.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	15	131.417.371,00	15	138.078.007,00	15	141.512.496,00	15	143.500.000,00	15	145.000.000,00		
5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0,00		0,00	20	20.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	10	30.000.000,00	10	40.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	70.000.000,00		
5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0,00	1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0,00		0,00	3	200.000.000,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik UPTD Bapenda	Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (%)	100	100	624.000.000,00	100	810.000.000,00	100	2.005.000.000,00	100	1.970.000.000,00	100	7.710.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0005 - UPT Bapenda Tana Tidung	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				71.000.000,00		145.000.000,00		190.000.000,00		170.000.000,00		240.000.000,00		
Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15	21	71.000.000,00		145.000.000,00	21	190.000.000,00		170.000.000,00	30	240.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				5		5		5		8			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10											
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				21.000.000,00		0,00		40.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15	21	21.000.000,00		0,00	21	40.000.000,00		0,00	30	50.000.000,00		
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		145.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	5	145.000.000,00	5	150.000.000,00	5	170.000.000,00	8	190.000.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				270.000.000,00		150.000.000,00		1.000.000.000,00		1.125.000.000,00		6.775.000.000,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		2	270.000.000,00	4	150.000.000,00		1.000.000.000,00	2	1.125.000.000,00	2	6.775.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1						1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)										1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)										1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				2				2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						1							
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		450.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00	1	450.000.000,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		650.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00	1	650.000.000,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		90.000.000,00		0,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		2	20.000.000,00	4	90.000.000,00		0,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		60.000.000,00		0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	2	60.000.000,00		0,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000,00		0,00		0,00		975.000.000,00		5.525.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	250.000.000,00		0,00		0,00	1	975.000.000,00	1	5.525.000.000,00		
5.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	1	1.000.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				283.000.000,00		515.000.000,00		815.000.000,00		675.000.000,00		695.000.000,00		
BMD Yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	283.000.000,00	1	515.000.000,00	1	815.000.000,00	1	675.000.000,00	1	695.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		40		40		40		45			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	11		10		11		11		11			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1					1							
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000,00		35.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00		
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				168.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	11	168.000.000,00	10	250.000.000,00	11	300.000.000,00	11	350.000.000,00	11	350.000.000,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	30.000.000,00	40	35.000.000,00	45	50.000.000,00		
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0,00		0,00	1	200.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
MENINGKATNYA KUALITAS PENYENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UPTD. BAPENDA	Persentase UPTD Bapenda yang melaksanakan Survey Kepuasan masyarakat (%)	100	100	1.235.000.000,00	100	12.411.235.000,00	100	9.985.047.000,00	100	9.899.500.000,00	100	9.285.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		1.450.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.750.000.000,00		
Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0,00	500	1.450.000.000,00	500	1.150.000.000,00	500	1.150.000.000,00	500	1.750.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5			100		20		20		20			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20			30		30		30		30			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		215						230			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		400.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	215	300.000.000,00		0,00		0,00	230	400.000.000,00		
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00		
5.02.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	700.000.000,00		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0,00	100	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00		
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		7.443.235.000,00		6.520.000.000,00		7.174.500.000,00		5.900.000.000,00		
Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18		0,00	1	7.443.235.000,00	2	6.520.000.000,00		7.174.500.000,00		5.900.000.000,00		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1			3		2							
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3			3						1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)						3							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)						2				1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2			2		1				1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				6		22		3					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3			1		12							
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2			3		2		3		2			
5.02.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		350.000.000,00		480.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0,00	1	350.000.000,00	12	480.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		550.000.000,00		1.900.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	18		0,00	1	550.000.000,00	2	1.900.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		600.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			0,00		0,00	3	600.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		180.000.000,00		940.000.000,00		174.500.000,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	6	180.000.000,00	22	940.000.000,00	3	174.500.000,00		0,00		
5.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		3.000.000.000,00		2.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0,00	3	3.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3		0,00	3	300.000.000,00		0,00		0,00	1	200.000.000,00		
5.02.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		2.550.000.000,00		200.000.000,00		7.000.000.000,00		5.500.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0,00	3	2.550.000.000,00	2	200.000.000,00	3	7.000.000.000,00	2	5.500.000.000,00		
5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		513.235.000,00		200.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0,00	2	513.235.000,00	1	200.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	2	200.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.235.000.000,00		3.518.000.000,00		2.315.047.000,00		1.575.000.000,00		1.635.000.000,00		
BMD yang terpelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2	2	1.235.000.000,00		3.518.000.000,00	2	2.315.047.000,00	2	1.575.000.000,00	2	1.635.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3			2		2		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4		4		4		3		3			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)				1									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	20		25		25		25		40			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5			20									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26		17		17		17		17			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3			5		1		2		2			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)								1					
5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		5	25.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	26	400.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00	17	200.000.000,00		
5.02.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		28.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0,00	20	28.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	20	10.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	40	40.000.000,00		
5.02.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0,00		0,00		0,00	1	50.000.000,00		0,00		
5.02.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				450.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2	2	450.000.000,00		400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		1.000.000.000,00		245.047.000,00		350.000.000,00		395.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0,00	5	1.000.000.000,00	1	245.047.000,00	2	350.000.000,00	2	395.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		215.000.000,00		795.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0,00	2	215.000.000,00	2	795.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
5.02.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0,00	1	1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.836.100.000,00		7.678.616.967,93		8.556.100.616,32		9.236.352.800,00		10.130.719.360,00		
Meningkatnya Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi	Realisasi PAD (Nilai)	0	87.339.580.000	249.100.000,00	89.086.372.000	879.120.000,00	90.868.100.000	1.054.944.000,00	92.685.461.000	1.265.932.800,00	94.539.170.000	1.519.119.360,00	5.02.0.00.0.00.03.0002 - UPT Bapenda Tarakan	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				249.100.000,00		879.120.000,00		1.054.944.000,00		1.265.932.800,00		1.519.119.360,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	0	0,00	1.500	323.280.000,00	1.500	387.936.000,00	1.500	465.523.200,00	1.500	558.627.840,00		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				0,00		323.280.000,00		387.936.000,00		465.523.200,00		558.627.840,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	0	0,00	1.500	323.280.000,00	1.500	387.936.000,00	1.500	465.523.200,00	1.500	558.627.840,00		
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		0,00	12	270.720.000,00	12	324.864.000,00	12	389.836.800,00	12	467.804.160,00		
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				0,00		270.720.000,00		324.864.000,00		389.836.800,00		467.804.160,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		0,00	12	270.720.000,00	12	324.864.000,00	12	389.836.800,00	12	467.804.160,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		249.100.000,00	12	285.120.000,00	12	342.144.000,00	12	410.572.800,00	12	492.687.360,00		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				249.100.000,00		285.120.000,00		342.144.000,00		410.572.800,00		492.687.360,00		
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		249.100.000,00	12	285.120.000,00	12	342.144.000,00	12	410.572.800,00	12	492.687.360,00		
MENINGKATNYA REALISASI PAD MELALUI UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI	Realisasi PAD (Nilai)	0	556.920.834.000	2.500.000.000,00	568.059.250.000	4.450.000.000,00	579.420.436.000	4.800.000.000,00	591.008.845.000	4.900.000.000,00	602.829.021.000	5.300.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah	
	Transaksi Non Tunai Terhadap Realisasi PAD (%)	0	60		62		64		66		68			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.500.000.000,00		4.450.000.000,00		4.800.000.000,00		4.900.000.000,00		5.300.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	1.000.000.000,00	12	1.750.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.200.000.000,00		
5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1.000.000.000,00		1.750.000.000,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	1.000.000.000,00	12	1.750.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	700.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.400.000.000,00		
5.02.04.1.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				700.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	12	12	700.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.400.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	800.000.000,00	12	1.400.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.600.000.000,00		
5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				800.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		
Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	800.000.000,00	12	1.400.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.600.000.000,00		
Meningkatnya Transaksi Non Tunai terhadap Realisasi PAD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)			0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
5.02.04.1.01.0014 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)			0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
Peningkatan Capaian PAD melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah (Rp)	0	42.790.257.000	970.000.000,00	43.646.062.000	1.129.144.858,14	44.518.983.000	1.356.934.513,47	45.409.363.000	1.600.000.000,00	46.317.550.000	1.690.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0003 - UPT Bapenda Nunukan	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				970.000.000,00		1.129.144.858,14		1.356.934.513,47		1.600.000.000,00		1.690.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	300	1.500	150.000.000,00	1.500	154.144.858,14	1.500	256.934.513,47	1.500	350.000.000,00	1.500	370.000.000,00		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				150.000.000,00		154.144.858,14		256.934.513,47		350.000.000,00		370.000.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	300	1.500	150.000.000,00	1.500	154.144.858,14	1.500	256.934.513,47	1.500	350.000.000,00	1.500	370.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		720.000.000,00	12	775.000.000,00	12	800.000.000,00	12	850.000.000,00	12	870.000.000,00		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				720.000.000,00		775.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		870.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		720.000.000,00	12	775.000.000,00	12	800.000.000,00	12	850.000.000,00	12	870.000.000,00		
Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi	Realisasi PAD (Nilai)	88,92	70.375.000.000	660.000.000,00	71.782.500.000	654.443.142,27	73.218.150.000	688.159.646,12	74.682.513.000	710.000.000,00	76.176.163.000	810.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPT Bapenda Bulungan	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				660.000.000,00		654.443.142,27		688.159.646,12		710.000.000,00		810.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	1.500	300.000.000,00	1.500	285.000.000,00	1.500	290.000.000,00	1.500	300.000.000,00	1.500	350.000.000,00		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				300.000.000,00		285.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	1.500	300.000.000,00	1.500	285.000.000,00	1.500	290.000.000,00	1.500	300.000.000,00	1.500	350.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		150	200.000.000,00	150	240.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	300.000.000,00		
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				200.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)		150	200.000.000,00	150	240.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	300.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	1.500	1.500	160.000.000,00	1.500	129.443.142,27	1.500	148.159.646,12	1.500	160.000.000,00	1.500	160.000.000,00		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				160.000.000,00		129.443.142,27		148.159.646,12		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	1.500	1.500	160.000.000,00	1.500	129.443.142,27	1.500	148.159.646,12	1.500	160.000.000,00	1.500	160.000.000,00		
Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Realisasi PAD (Nilai)	100	9.530.175.000	227.000.000,00	9.720.780.000	304.177.798,52	9.915.194.000	362.189.210,67	10.113.498.000	422.950.000,00	10.315.768.000	465.000.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0005 - UPT Bapenda Tana Tidung	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				227.000.000,00		304.177.798,52		362.189.210,67		422.950.000,00		465.000.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	1.500	80.000.000,00	1.500	100.000.000,00	1.500	110.000.000,00	1.500	120.000.000,00	1.500	130.000.000,00		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	1.500	80.000.000,00	1.500	100.000.000,00	1.500	110.000.000,00	1.500	120.000.000,00	1.500	130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	47.000.000,00	12	92.000.000,00	12	105.000.000,00	12	121.250.000,00	12	135.000.000,00		
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				47.000.000,00		92.000.000,00		105.000.000,00		121.250.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	47.000.000,00	12	92.000.000,00	12	105.000.000,00	12	121.250.000,00	12	135.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	112.177.798,52	12	147.189.210,67	12	181.700.000,00	12	200.000.000,00		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				100.000.000,00		112.177.798,52		147.189.210,67		181.700.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	112.177.798,52	12	147.189.210,67	12	181.700.000,00	12	200.000.000,00		
PENINGKATAN CAPAIAN REALISASI PAD MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	Realisasi PAD (Nilai)	100	31.886.970.000	230.000.000,00	32.524.710.000	261.731.169,00	33.175.204.000	293.873.246,06	33.838.708.000	337.470.000,00	34.515.482.000	346.600.000,00	5.02.0.00.0.00.03.0004 - UPT Bapenda Malinau	
5.02.04.1.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				230.000.000,00		261.731.169,00		293.873.246,06		337.470.000,00		346.600.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	12	68.000.000,00	12	75.000.000,00	12	76.698.492,06	12	93.170.000,00	12	95.500.000,00		
5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah				68.000.000,00		75.000.000,00		76.698.492,06		93.170.000,00		95.500.000,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dokumen SSPD)	1.500	12	68.000.000,00	12	75.000.000,00	12	76.698.492,06	12	93.170.000,00	12	95.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.500	1.200	40.000.000,00	1.300	64.731.169,00	1.400	65.500.000,00	1.500	72.300.000,00	1.600	75.600.000,00		
5.02.04.1.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				40.000.000,00		64.731.169,00		65.500.000,00		72.300.000,00		75.600.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.500	1.200	40.000.000,00	1.300	64.731.169,00	1.400	65.500.000,00	1.500	72.300.000,00	1.600	75.600.000,00		
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daaerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		122.000.000,00	12	122.000.000,00	12	151.674.754,00	12	172.000.000,00	12	175.500.000,00		
5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				122.000.000,00		122.000.000,00		151.674.754,00		172.000.000,00		175.500.000,00		
Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	12		122.000.000,00	12	122.000.000,00	12	151.674.754,00	12	172.000.000,00	12	175.500.000,00		

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➢ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ➢ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Impelmentasi Peraturan Perundang - Undangan	
2	***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*** Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah ➢ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ➢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➢ Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah ➢ Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
3	***PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH*** Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Target PAD Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah ➢ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah ➢ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ➢ Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

SumberBAPENDA Prov, Kaltara 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Sat	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah*	*%*	*30*	*32,00*	*35,00*	*37,00*	*39,00*	*42,00*	*45,00*	
2	*Persentase Kenaikan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*	*%*	*5*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	
3	*Nilai SKM Perangkat Daerah*	*Nilai*	*90,90*	*91,22*	*91,72*	*92,22*	*92,72*	*93,22*	*93,72*	
4	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	*Nilai*	*72,01*	*75,00*	*79,50*	*81,50*	*83,00*	*85,00*	*86,50*	

Sumber Bapenda Prov. Kaltara

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Badan Pendapatan Daerah menjalakan Urusan Penunjang Pemerintah bidang keuangan, IKK Badan Pendapat Daerah adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Sat	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah*	*%*	*30,00*	*32,00*	*35,00*	*37,00*	*39,00*	*42,00*	*45,00*	

Sumber: RPJMD Kalimantan Utara 2025-2029

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan,

pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Renstra

(Rencana Strategis Daerah)

2025 - 2029

